

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran Virus Corona atau yang lebih dikenal Covid-19 di dunia yang telah diindikasikan kasusnya telah membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dalam menangani atau mencegah penularan Covid-19 dan juga Covid-19 ini membawa kejutan secara ekonomi, keuangan dan sosial bagi masyarakat dunia. Organisasi untuk kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (*Organization for Economic Co-operation and Development, OECD*) mengingatkan pandemi ini juga berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dunia.

Dampak ekonomi pandemi Covid-19 menyebabkan melemahnya perekonomian global 2020 karena investor akan menarik aliran modal terutama modal investasi di negara berkembang. Indikator krisis dapat dilihat dari beberapa gejala yaitu defisit neraca pembayaran dan perdagangan yang melebar, melemahnya nilai tukar mata uang sebuah negara, adanya peningkatan inflasi, dan turunnya indeks harga saham gabungan sebuah negara.

Penyebaran Covid-19 yang melanda banyak negara termasuk Indonesia, beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19 yang diberlakukannya semenjak virus ini masuk ke Indonesia. Adapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia diantaranya dengan menetapkan kebijakan protokol kesehatan sesuai himbauan dari WHO, melakukan berbagai penyediaan fasilitas kesehatan bagi pasien yang terserang covid-19 serta melakukan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) yang berkembang menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia. Munculnya pandemi virus corona di Indonesia mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia, khususnya pada sektor perekonomian. Hampir seluruh negara di dunia terkena dampak dari masuknya pandemi Covid-19 ini, yang pada akhirnya semakin menimbulkan gejolak perekonomian. Peran dan kebijakan pemerintah dalam memerangi pandemi Covid-19 ini tentunya menjadi sangat

penting untuk keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi dari sisi perekonomian. Bagaimana pemerintah mampu berperan menjaga ketidakstabilan yang mengguncang perekonomian di saat-saat wabah ini menyerang dengan kebijakan-kebijakan yang efektif yang diharapkan bisa membangkitkan perekonomian kembali.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerugian yang signifikan. Tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang ekonomi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah menyediakan dana penanggulangan pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 405,1 triliun. Salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan dana dalam menanggulangi pandemi ini adalah dengan melakukan penyesuaian atau penghematan belanja kementerian/lembaga. Selain melakukan revisi karena penyesuaian/penghematan secara nasional, revisi anggaran juga dilakukan untuk mengakomodir munculnya akun baru guna mendukung pencegahan Covid-19 yang dapat dibiayai dengan dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-*red*) satuan kerja, seperti pembelian masker, *hand sanitizer*, disinfektan, dan persediaan obat-obatan yang sebelumnya tidak dianggarkan. Biaya operasional pencegahan Covid-19 tersebut dianggarkan dengan mengurangi alokasi biaya pada pos-pos lainnya (*Refocussing* dan Realokasi Anggaran). (djkn.kemenkeu.go.id)

Berlakunya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, Indonesia telah dinyatakan mengalami darurat kesehatan yang mengharuskan diberlakukannya pencegahan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampak dari adanya penyebaran Covid-19 juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Pembelajaran di sekolah-sekolah beralih dilakukan secara daring. Hal tersebut dilakukan dengan guna menekankan angka penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga pendidikan. Pembelajaran selama pandemi yang dilaksanakan secara daring disebabkan adanya syarat pemenuhan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 ini. (Sadikin & Hamidah, 2020)

Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 sebesar Rp 81,5 Triliun. Berdasarkan rapat kerja perdana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X DPR RI di tahun 2021 memutuskan 20% dari APBN atau sebesar Rp 550 triliun akan dialokasikan untuk dana pendidikan. Dari 20% anggaran tersebut, Kemendikbud mengelola sebesar 14,8% atau sebesar Rp 81,5 triliun. Sesuai dengan undang-undang selain Kemendikbud, anggaran pendidikan dikelola pula oleh berbagai kementerian atau lembaga lainnya yang melaksanakan fungsi pendidikan, seperti Kementerian Agama (Kemenag). Terdapat selisih jumlah anggaran pendidikan antara tahun 2021 dan tahun sebelumnya yang besaran anggaran tersebut berkisar Rp 5 triliun. Selisih realisasi pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya di pengaruhi oleh reorganisasi di lingkup internal kementerian. Selain itu selisih tersebut dikarenakan adanya kebijakan yang perlu diambil untuk merespon pandemi Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang telah ditetapkan maka sekolah dapat menggunakan dana BOS dengan ketentuan, yang pertama bahwa pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Kedua, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Substansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik wajib dilakukan menggunakan perencanaan, pengawasan, penilaian, pelaporan, & penentuan budget. Anggaran yang digunakan dalam dunia pendidikan khususnya Dana bantuan operasional sekolah merupakan sekumpulan dokumen yang wajib dimiliki oleh pihak yang berkepentingan dibidangnya yaitu kepala sekolah, tim yang memiliki wewenang dalam dana BOS, dan komite sebagai pelaksanaan sistem pembelajaran di

setiap sekolah pada awal tahun pelajaran. Dana BOS terdapat sekumpulan spekulasi budget tentang penyelenggaraan dalam mendukung pembiayaan kegiatan pendidikan berdasarkan rencana dan program yang telah dirancang.

Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi, seorang kepala sekolah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang dimiliki oleh sekolah kepada orang tua siswa, laporan keuangan yang disampaikan kepada orang tua siswa adalah laporan keuangan yang diadakan dalam kegiatan komite, laporan keuangan dalam rehabilitas sarana dan prasaranan, dan laporan keuangan yang berasal dari bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terutama tentang penerimaan dan pengeluaran oleh sekolah. Dengan demikian, standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan.

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun berdasarkan hasil rapat atau kesepakatan yang dilakukan bersama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah yang diputuskan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah. RKAS yang telah disusun harus disesuaikan antara penerimaan dana BOS dengan prioritas sesuai dengan peraturan yang telah ada. Kebutuhan yang tidak menjadi prioritas bisa didanai oleh pemerintah daerah atau sumber lain yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban yang dilakukan instansi, dimana pihak yang berkepentingan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan dan kerjakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di salah satu SMPN di Kota Prabumulih pada tanggal 8 Juni 2022 mengenai fenomena dari variable akuntabilitas bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan komite tidak melakukan pelatihan mengenai dana BOS, dan tidak ada pelatihan yang dilakukan

secara rutinitas oleh Dinas Pendidikan, tetapi dalam pengelolaan dana BOS ini pernah diadakannya pelatihan oleh Pemerintah Pusat.

Transparansi juga menjadi hal wajib dalam pengadaan anggaran dan pelaporan, dikarenakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS yaitu sekolah memberikan informasi mengenai pelaporan yang jujur dan terbuka kepada publik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di salah satu SMPN di Kota Prabumulih pada tanggal 8 Juni 2022 mengenai fenomena dari variable transparansi bahwa komite menerima informasi alokasi penggunaan dan penyaluran dana BOS tetapi tidak semua kegiatan secara intern harus diketahui oleh komite.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah di salah satu SMPN di Kota Prabumulih bahwa partisipasi orang tua yang menjadi salah satu variable sangat mendukung dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) salah satunya orang tua terlibat dalam bentuk ide dan gagasan melalui komite sekolah akan tetapi bantuan orang tua dalam menyumbangkan dana ataupun tenaga tidak ada karena keterbatasan perekonomian masyarakat di daerah SMPN tersebut . Dan juga orang tua tidak melakukan kontrol dalam pengelolaan dana BOS secara rutinitas tetapi orang tua dapat mengetahui alokasi pengeluaran dana BOS tetapi secara umum, tidak detail.

Efektivitas menggambarkan ukuran mengenai sejauh mana keberhasilan dari program tersebut dapat tercapai sehingga program tersebut dapat tercapai maka makin besar tingkat efektivitasnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah bahwa besaran dana BOS/siswa tidak cukup memadai dengan lokasi dan kebutuhan siswa, karena menurut dalam kegiatan yang telah dijalani selama kegiatan sekolah karena masih ada keterbatasan dari dana BOS tersebut, besar kecilnya suatu sekolah itu tidak tergantung dari kebutuhan kegiatan siswa dan guru disekolah.

Terdapat penelitian-penelitian yang telah membahas mengenai efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam penelitian

(Rakhmawati 2018) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variable Moderasi menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, dan dalam penelitian ini variable partisipasi digunakan sebagai variable pemoderasi dan dalam penelitian ini disimpulkan partisipasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusra,dkk 2021) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara: Partisipasi Stakeholder Sebagai Variable Moderasi menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan, dan juga partisipasi sebagai variable Z mampu mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana BOS.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD DAN SMP DI KOTA PRABUMULIH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Kota Prabumulih?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Kota Prabumulih?

3. Apakah Partisipasi Orang Tua berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Kota Prabumulih?
4. Apakah variable Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Orang Tua berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Kota Prabumulih?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai batasan masalah agar masalah yang diteliti tefokus pada tujuan utama dan tidak meluas pada hal lain. Penelitian ini menggunakan variable independen yang terdiri dari Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Orang Tua. Variable dependen dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Kota Prabumulih.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Kota Prabumulih
2. Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Kota Prabumulih
3. Pengaruh Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Kota Prabumulih
4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP di Kota Prabumulih.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi orang tua dalam pengelolaan anggaran keuangan sekolah yaitu dana BOS sehingga peneliti dapat menerapkan ilmu dan teori yang di telah di pelajari.

2. Bagi sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran dan bahan pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran keuangan sekolah.

3. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi, masukan, dan bahan pertimbangan dalam hal pengawasan dan penilaian yang dilakukan sekolah dalam pengelolaan anggaran keuangan sekolah.

4. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS, sehingga masyarakat dapat menganalisis apakah pengelolaan dana BOS di wilayahnya efektif atau tidak.

5. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukkan, sumber informasi, dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, agar bisa dikembangkan untuk memperluas objek penelitian.